



Tekan Kebocoran PAD

● Pemkot Yogya Genjot Digitalisasi Keuangan di Semua Sektor

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tancap gas melangsungkan transformasi tata kelola keuangan daerah menuju arah digital sepenuhnya. Langkah ini diambil bukan sekadar mengikuti tren, namun upaya konkret meningkatkan transparansi sekaligus menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan, wilayahnya punya modal kuat sebagai *pilot project* digitalisasi nasional, baik dari sisi geografis maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, ia tak ragu untuk menerapkan kebijakan yang sedikit memaksa, supaya ekosistem digital segera terbentuk di berbagai sektor publik.

"Tapi, memaksa ini bukan asal memaksa, kita sediakan fasilitasnya. Ada pelatihannya, ada programnya, bahkan kita siapkan joki untuk membantu masyarakat membayar secara digital," ujar Hasto, sesuai *High Level Meeting* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (12/3).

Hasto menyoroti sektor penyewaan lapak pasar yang memiliki omzet besar namun penggunaan transaksi digitalnya masih di bawah 50 persen. Padahal, mantan Kepala BKKBN RI tersebut meyakini, digitalisasi merupakan salah satu kunci utama agar akuntabilitas keuangan terjaga.

"Dengan cara begitulah kita bisa transparan. Tidak ada lagi orang yang ngunthet (mengambil sebagian uang), memotong, atau membawa uang tunai, itu sangat berisiko. Semuanya adil sesuai fakta di lapangan," tegasnya.

Sektor parkir juga menjadi perhatian serius, di mana Wali Kota telah menargetkan perluasan titik-titik parkir non-tunai secara masif pada tahun ini. Dari yang semula hanya 100 titik, pihaknya mendo-



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

LUNCURKAN APLIKASI - Peluncuran aplikasi pemesanan tiket Taman Pintar secara daring di sela *High Level Meeting* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (12/3).

rong realisasi hingga 350 titik dalam waktu dekat, serta ditargetkan menyentuh 700 titik per akhir 2026.

Di samping itu, Pemkot Yogyakarta juga mengulirkan inovasi QRIS Tap di area parkir Ngabean, yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Digitalisasi parkir ini disebut menjadi solusi ampuh untuk memberantas praktik nuthuk, atau pungutan tarif di luar ketentuan, yang kerap meresahkan wisatawan.

Sebagai informasi, capaian digitalisasi pendapatan daerah di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, dengan realisasi mencapai 72 persen pada 2025 lalu. Torehan apik tersebut, didorong oleh berbagai inovasi seperti aplikasi non-tunai hingga sistem jemput bola langsung ke tengah-tengah warga masyarakat.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini menyatakan optimalisasi digitalisasi senantiasa dilakukannya. Salah satunya, dengan penyediaan joki, atau petugas pendampingan untuk membantu warga yang meng-

alami kesulitan teknis saat melakukan pembayaran digital.

Pendampingan diprioritaskan bagi masyarakat yang belum mampu atau belum memiliki akses mandiri terhadap platform digital yang disediakan. Ia pun tidak memungkiri, problematika tersebut menjadi kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, untuk menggenjot transaksi digital.

"Memang tantangan yang terbesar adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Makanya beberapa strategi tadi harus kita siapkan. Jangan sampai warga terhambat mengakses layanan publik hanya karena kendala metode pembayaran," terangnya.

Dalam acara tersebut, Bank BPD DIY juga menyerahkan bantuan perangkat transaksi digital yang dapat digunakan oleh OPD untuk mempermudah operasional non-tunai. Sebagai penutup rangkaian *High Level Meeting*, dilakukan peluncuran aplikasi pemesanan tiket Taman Pintar secara daring, dengan proses reservasi yang lebih praktis dan terintegrasi secara digital. (aka/ord)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005